

POLA REKRUTMEN PARTAI DEMOKRAT DALAM MENENTUKAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KOTA SORONG

Masni Banggu^{1*}, Mohamad Saleh Refra², Rislen Alvionita Tomhisa³, Salmawati⁴,
Uswatul Mardiyah⁵

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong.
Indonesia

⁵Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong. Indonesia

*Korespondensi: masnibanggu05@gmail.com

ABSTRACT

This research is to find out the pattern of recruitment and the criteria for determining the Democratic Party legislative candidates in the 2019 legislative elections in Sorong City. Using a qualitative research method with a descriptive type of analysis. Data collection was carried out through observation, interviews, and literature review. The informants were selected by the authors according to the use of non-probability techniques, namely according to their capabilities or authority in answering questions from the authors. The results show are first, the pattern of recruitment of the Democratic Party for legislative candidates is carried out in two ways, namely internal recruitment, the party nominating its cadres to advance as candidates for legislative members in the 2019 legislative elections in Sorong City based on internal party rules. Meanwhile, externally, parties can recruit members of the public who are not originally democratic party cadres but have the potential to win constituent votes so that they can be recruited as democratic party cadres. Second, the criteria for determining candidates for legislative members from the Democratic Party in the 2019 legislative elections in Sorong City are determined by the party chairman, but it is also inseparable that deliberations and open meetings with party members are also part of the party chairman's considerations.

Keywords: *Political Recruitment; Democratic Party; Legislative Election*

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui pola rekrutmen kader dan kriteria penentuan calon anggota legislatif Partai Demokrat pada pemilihan legislatif tahun 2019 di Kota Sorong. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan kajian pustaka. Informan dipilih oleh penulis sesuai dengan menggunakan teknik *nonprobability* yakni sesuai dengan kapabilitas atau otoritas dalam menjawab pertanyaan dari penulis. Hasil yang ditunjukkan pertama, Pola rekrutmen Partai Demokrat untuk calon anggota legislatif dilakukan dengan dua cara yaitu rekrutmen secara internal yakni partai mencalonkan kadernya untuk maju menjadi calon anggota legislatif pada pemilihan legislatif tahun 2019 di Kota Sorong berdasarkan aturan internal partai. Sedangkan secara eksternal, partai dapat merekrut masyarakat yang awalnya bukan kader partai demokrat tetapi memiliki potensi untuk meraih suara konstituen sehingga dapat direkrut sebagai kader partai demokrat. Kedua, kriteria penentuan calon anggota legislatif dari Partai Demokrat pada pemilihan legislatif tahun 2019 di Kota Sorong ditentukan oleh Ketua partai, tetapi tidak terlepas juga bahwa musyawarah serta rapat terbuka bersama para anggota partai juga sebagai bagian dari pertimbangan Ketua partai.

Kata kunci: Rekrutmen Politik; Partai Demokrat; Pemilihan Legislatif

PENDAHULUAN

Partai politik memiliki peran yang sangat penting, baik di negara demokrasi maupun rezim non demokrasi. Sebagian besar keberadaan partai politik dikatakan sebagai salah satu indikator berjalannya sistem politik yang mengakui keberadaan rakyat dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

Hak warga negara untuk berserikat dapat tercermin dari adanya pembentukan partai politik. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa warga negara memiliki kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Partai Politik menjadi salah satu wadah atau tempat untuk warga negara dapat mewujudkan haknya dalam memberikan pendapat tentang arah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas dibutuhkan peran partai politik sebagai organisasi yang memiliki fungsi sebagai rekrutmen politik. Pemimpin yang berkualitas tidak hanya berfokus pada kepentingan partai politik yang diwakili saja tetapi juga menjadi pemimpin semua orang.

Seorang pemimpin perlu mendapatkan pendidikan baik formal maupun nonformal dalam membentuk karakter pemimpin. Pendidikan formal yakni pendidikan yang didapat sejak dia berada

dibangku sekolah dasar hingga ke tingkat perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan nonformal bisa diperoleh dari manapun salah satunya pendidikan politik dalam partai politik. Partai politik dapat memberikan pelatihan kepada calon-calon politik untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka dalam kampanye politik, debat publik, dan mengelola pemerintahan.

Partai politik dapat mencari calon-calon pemimpin yang potensial melalui berbagai cara, seperti dengan mengadakan wawancara, mengadakan seleksi terbuka, atau dengan melihat rekam jejak dan prestasi calon kader partai. Rekrutmen politik menjadi fungsi dari partai politik yang bertujuan untuk memilih calon pemimpin yang akan ditawarkan ke masyarakat pada saat pemilihan umum. Dalam Undang-Undang Partai Politik No. 2 tahun 2011, disebutkan bahwa rekrutmen dilakukan melalui seleksi kader secara demokrasi yang sesuai dengan ADRT partai dengan mempertimbangkan 30% keterwakilan perempuan. Partai politik sebagai peserta pemilu harus menyiapkan kader-kadernya untuk masuk dalam pencalonan anggota legislatif ataupun pencalonan kepala daerah.

Dalam pemilihan umum tahun 2019 dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah di Indonesia, yakni memilih anggota

DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Pada pemilu legislatif diikuti oleh 16 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Aceh dengan sistem pemilu yang digunakan ialah sistem *proposional* terbuka.

Sistem *proposional* terbuka merupakan salah satu tipe sistem pemilihan umum yang digunakan dalam pemilihan umum tahun 2019 di Indonesia. Dalam sistem pemilihan ini pemilih diberikan haknya untuk memilih atau menentukan pilihannya berdasarkan calegnya dibandingkan partainya. Sistem ini juga menerapkan siapa yang memperoleh suara terbanyak dialah yang mendapatkan kursi tanpa melihat nomor urut calon anggota legislatif.

Di wilayah Provinsi Papua Barat, Demokrat menempati posisi kelima dalam urutan perolehan suara yakni sebanyak 68.147 suara pada pemilihan legislatif tahun 2019. Lebih khususnya lagi di Kota Sorong, Partai Demokrat pada pileg 2019 hanya memperoleh 3 kursi dibandingkan pileg sebelumnya yang memperoleh 5 kursi di DPRD Kota Sorong. Penurunan perolehan suara partai Demokrat di ranah nasional ternyata juga mempengaruhi perolehan suara partai politik di tingkat lokal. Anggota partai

Demokrat yang berhasil mendapatkan kursi di DPRD kota Sorong periode 2019-2024 ialah Melkianus Way (Dapil 1 Kota Sorong), Selestinus Paundanan (Dapil 2 Kota Sorong) dan Kumisi Abbas (Dapil 3 Kota Sorong). Dari ketiga kader Partai Demokrat yang terpilih, dua orang merupakan petahana dan satu orang merupakan pendatang baru (Melkianus Way).

Peningkatan atau penurunan perolehan suara/kursi partai politik tidak serta-merta dikarenakan pemimpinnya, namun hal ini juga tidak lepas dari peran anggota/kader partai Demokrat dalam membangun pencitraan partai di masyarakat. Program-program partai yang dapat mencapai sasaran serta pembentukan citra partai sangat dipengaruhi oleh kemampuan atau kualitas dari para kadernya. Untuk mendapatkan kader yang berkualitas dibutuhkan proses seleksi atau rekrutmen kader sehingga dapat menghasilkan pemimpin atau pejabat yang peduli terhadap rakyat.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Sekretariat Partai Demokrat cabang Kota Sorong. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskripsi analisis. Data dikumpulkan dengan cara melalui observasi, wawancara langsung dengan para

kader partai atau pengurus inti partai Demokrat Cabang Kota Sorong dengan subjek terkait dan kajian pustaka. Teknik penentuan informan dilakukan melalui teknik *nonprobability purposive* yakni memilih para informan yang dianggap mempunyai kapabilitas dan otoritas dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis. Para informan tersebut terdiri dari beberapa pengurus inti Partai Demokrat yang ada di cabang Kota Sorong. Teknik analisis data dilakukan dengan membuat *transkrip* wawancara yang dilakukan dengan informan selanjutnya data disajikan dalam bentuk pernyataan dari informan dan dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat di Kota Sorong

Rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi dari partai politik untuk memilih atau menyeleksi calon pemimpin internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Setiap partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian partai tidak akan sulit untuk menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional (Budiardjo, 2008: 408).

Pola rekrutmen politik dapat memiliki dampak yang signifikan pada bentuk dan kualitas perwakilan politik, kerana dapat mempengaruhi siapa yang terpilih untuk mengisi posisi politik dan seberapa representatif mereka terhadap kelompok masyarakat. Partai Demokrat dalam merekrut anggota kader-kadernya dilakukan secara terbuka yang artinya tidak membatasi bagi setiap orang yang mau bergabung dengan partai Demokrat. Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Bapak Yonas Howay terkait dengan Pola Rekrutmen Kader Partai Demokrat.

“Dalam proses kader ini secara eksternal dan internal untuk internal kader yang sudah menjalin komunikasi, sudah jadi pengurus, dan sudah jabarkan tugas-tugas. Sedangkan kader eksternal itu masyarakat yang ada di luar tetapi potensial dari pendidikannya, pengalamannya, adaptasi dengan masyarakat, kemampuan spiritualnya itu yang kita rekrut menjadi caleg di Tahun 2019” (Hasil wawancara 04 Oktober, 2022)”.

Proses rekrutmen Partai Demokrat di Kota Sorong terhadap calon anggota legislatif tahun 2019 dilakukan secara internal maupun eksternal. Untuk internal, partai demokrat mempertimbangkan atau melihat kinerja dari para kader partai yang telah lama bergabung dan sudah memahami lingkungan politik. Proses seleksi untuk

internal partai biasanya dilakukan dengan beberapa tahapan. Partai politik seringkali merekrut kandidat mereka dari kalangan elit politik, seperti anggota parlemen (petahana), pejabat publik, dan tokoh masyarakat yang dikenal yang merupakan kader partai.

Rekrutmen ini dilakukan dengan proses seleksi internal partai, seperti pemilihan calon dalam rapat atau pengangkatan dari pimpinan partai. Kader Partai Demokrat yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Sorong ada tiga orang yang mana dua orang merupakan petahana (Kumisi Abbas dan Selestinus Paundan) dan satu orang pendatang baru (Melkianus Way) yang kemudian dipilih sebagai Wakil Ketua I DPRD Kota Sorong. Sedangkan rekrutmen secara eksternal maksudnya adalah masyarakat yang awalnya bukan merupakan kader partai demokrat, yang kemudian berkeinginan atau berencana mendaftarkan diri menjadi calon anggota legislatif di Kota Sorong dapat bergabung dengan partai demokrat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh partai.

Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik memiliki kepentingan untuk memperluas atau memperbanyak keanggotaannya (kader). Sehingga partai berusaha untuk menarik sebanyak-banyaknya orang menjadi anggota kadernya (Budiardjo,

2008: 408). Rekrutmen secara eksternal yang dilakukan oleh partai adalah hal sangat signifikan karna untuk mendapatkan kader-kader yang dinilai berkualitas dan dapat menaikan *elektabilitas* partai.

Ketokohan dan modal finansial yang dimiliki oleh seseorang yang berasal dari luar partai (belum menjadi kader) menjadi pertimbangan partai dapat merekrut kader untuk diajukan sebagai calon anggota legislatif. Dalam proses perekrutan didalam partai politik terkait dengan pembentukan dan pengembangan struktur politik, oleh karena itu sangat penting bagi partai politik untuk merekrut individu atau masyarakat luar yang memiliki potensi, berkompeten, berdedikasi dan dapat memperkuat kekuatan politik partai. Konsep rekrutmen politik, rekrutmen merupakan proses seseorang atau individu untuk menjadi anggota partai politik. Fungsi rekrutmen partai politik dapat menjamin kontinuitas dan merupakan salah satu cara untuk menyeleksi para calon pemimpin (Syahputra, 2012). Selain itu, melalui partai politik-lah dilakukan rekrutmen dan seleksi terhadap calon-calon anggota lembaga perwakilan.

Dalam merekrut anggota kader partai politik tidak semua masyarakat mau bergabung dengan partai politik yang kebanyakan anggota bergabung untuk

sekedar ikut-ikutan, hanya mencari pamor dan kemudian berpindah partai lagi. Masyarakat memandang partai sebagai sebuah peluang untuk mencari popularitas di masyarakat, tetapi pada umumnya jika dilihat partai politik sangat memiliki peran yang besar dalam masyarakat bukan hanya sebagai sarana dalam menyalurkan aspirasi masyarakat melainkan partai dapat memperjuangkan hak-hak masyarakat. Untuk partai demokrat sendiri dalam merekrut kader sangat melihat potensi dan kualitas dari kader yang nantinya akan diajarkan untuk menjadi seseorang yang kompeten dan berkualitas dalam menaikan pamor partai.

Hal ini sesuai dengan konsep rekrutmen politik bahwa menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin (Budiardjo, 2008: 409). Partai politik tidak hanya merekrut kader internal partai tetapi juga melakukan rekrutmen berbasis masyarakat, dalam arti kandidat dapat direkrut melalui dukungan dari masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Hal ini dapat dilakukan melalui jaringan sosial atau organisasi masyarakat, dan kandidat yang direkrut seringkali memiliki reputasi yang baik dan memiliki pengalaman kepemimpinan dalam masyarakat.

Perekrutan partai politik tidak terlepas dari namanya kader perempuan dimana peran kader perempuan dalam sebuah partai juga dianggap penting. Berbicara tentang politik perwakilan perempuan, maknanya bukan persoalan angka atau jumlah yang bersifat deskriptif dan dihasilkan melalui proses pemilihan berupa hadirnya perempuan sebagai calon anggota legislatif. Tetapi bagaimana seorang kader atau calon anggota legislatif perempuan memiliki kemampuan atau potensi yang dapat membangun citra positif dimata masyarakat.

“Di partai Demokrat ini kesempatan perempuan dalam berpolitik dibuka seluas-luasnya mereka bebas menyuarkan aspirasi politik mereka” (Wawancara 04 Oktober 2022).

Kouta perempuan dalam partai politik merupakan suatu kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan, tujuan dari kuota perempuan dalam partai politik untuk menciptakan kesetaraan gender dalam politik dan mengurangi kesenjangan gender dalam pengambilan keputusan. Selain itu kuota perempuan dalam partai politik dirancang untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses yang sama dengan laki-laki dalam kegiatan politik.

Kebijakan yang mendukung tentang kesetaraan gender dalam politik yakni *affirmative action*, yang mana negara memberikan perlakuan khusus kepada kelompok khusus dalam hal ini adalah perempuan untuk mempercepat kesetaraan dan keadilan dengan menerapkan sistem kuota yakni kuota 30% (Devitasari, 2017).

Menurut Ignatius Mulyono, sejak pemilihan umum tahun 2009 kebijakan *affirmative action* telah diterapkan yakni sistem kuota (30% kuota perempuan dalam partai politik) dan sistem zipper (di dalam daftar bakal calon, dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon). Perempuan tidak hanya dicalonkan dengan angka kuota 30 % tetapi juga harus disertakan dalam daftar minimal satu perempuan di antara tiga calon. Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif juga memberikan kewajiban partai politik peserta pemilu untuk memenuhi kuota 30 % perempuan di daftar calon legislatif dan minimal terdapat satu perempuan di antara tiga calon legislatif (Devitasari, 2017).

Kriteria Partai Demokrat Dalam Menentukan Calon Anggota Legislatif

Dalam kriteria pemilihan bakal calon anggota Legislatif dalam partai politik dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan

mekanisme seleksi yang diterapkan oleh partai politik masing-masing. Namun, ada beberapa kriteria umum yang sering digunakan dalam menentukan bakal calon anggota legislatif. Calon anggota partai politik yang diusung oleh partai biasanya harus mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap partai politik dan tidak terikat pada kepentingan kelompok atau individu. Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Yonas Howay terkait dengan syarat Partai Demokrat dalam menentukan seseorang untuk menjadi calon anggota legislatif.

“Ada persyaratan yang kita buat di Tahun 2019 minimal menjadi kader partai dan kader aktif. Setelah itu kita akan memberikan informasi kepada masyarakat umum, jadi walaupun dia belum menjadi kader partai dia bisa mencalonkan dengan persyaratan dia harus menjadi kader partai dan syarat utama yaitu dia harus memiliki Kartu Tanda Anggota. (Hasil wawancara 04 Oktober 2022)

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Bapak Alberth Ketor Siloinyanan terkait dengan kader partai yang mencalon yang akan mencalonkan sebagai calon anggota legislatif.

“Semua kader khususnya partai demokrat mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk memilih dan dipilih yang artinya semua kader dapat ikut serta untuk mencalonkan

diri sebagai calon legislatif". (Hasil wawancara 08 Oktober 2022)

Pada proses penentuan bakal calon anggota legislatif partai demokrat menerapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon anggota legislatif baik dari pihak masyarakat maupun dari dalam partai sendiri. Jika dilihat dari partai menentukan calon anggota legislatif yang merupakan kader aktif sedangkan untuk masyarakat umum yang belum menjadi kader partai sekalipun bisa mencalonkan diri untuk berpartisipasi dalam pemilihan legislatif dengan syarat anggota masyarakat tersebut harus menjadi kader partai demokrat terlebih dahulu dan harus memiliki kartu tanda anggota yang menjadi persyaratan penting dalam pemilihan legislatif serta kader juga harus memiliki visi-misi yang sesuai dengan Partai Demokrat.

Partai politik pada umumnya mencari calon anggota legislatif yang mempunyai kualitas kepemimpinan yang baik dan mampu memimpin dan mewakili kepentingan rakyat. Kualitas kepemimpinan juga sangat mempengaruhi partai dalam menentukan bakal calon anggota legislatif. Pada tahap penetapan bakal calon anggota legislatif tidak semua orang bisa masuk dan bergabung dalam partai untuk mengambil bagian dalam pemilihan legislatif tetapi dilihat berdasarkan kemampuan dan

popularitas dan kualitas dari setiap orang serta standar pendidikan, dari mana daerah asalnya, kesehatan, sikapnya dalam masyarakat, riwayat hidup dan kader anggota partai sendiri tidak dibiarkan harus menjadi kader dalam jangka waktu lama namun jika bisa memenuhi semua persyaratan yang ada maka anggota kader bisa mendaftarkan diri menjadi bakal calon anggota legislatif.

Partai demokrat sendiri memiliki direktur eksekutif yang memiliki tugas dalam menangani urusan partai secara khusus. Tidak hanya itu dalam sebuah partai ketika menjelang pemilihan legislatif bukan saja penetapan bakal calon legislatif tetapi penatapan nomor urut serta kewenangan partai dalam menentukan dan memutuskan kader yang akan maju dan mewakili partai pada pemilihan legislatif.

Penentuan calon anggota legislatif dapat dilakukan oleh berbagai pihak tergantung pada struktur organisasi dan kebijakan partai. Pada umumnya ada beberapa pihak yang terlibat dalam menentukan calon anggota legislatif. Pertama, DPP (Dewan Pimpinan Pusat) adalah badan yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dalam partai politik, termasuk menentukan siapa yang akan diusung sebagai calon anggota legislatif. Biasanya, DPP memiliki tim

seleksi yang melakukan pemilihan dan seleksi calon anggota legislatif dari kader-kader partai atau dari luar partai yang potensial. Kedua, DPD (Dewan Pimpinan Daerah) adalah badan yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dalam partai politik di tingkat daerah, termasuk menentukan siapa yang akan diusung sebagai calon anggota legislatif untuk wilayah daerahnya.

Ketiga, Forum Komunikasi Antar Parlemen merupakan wadah bagi para anggota legislatif dari partai politik yang berbeda untuk berkomunikasi dan berdiskusi mengenai isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat. Forum komunikasi ini dapat mempengaruhi penentuan calon anggota legislatif melalui rekomendasi dan pengarahan pada DPP dan DPD. Keempat, basis dukungan partai politik para kader partai politik, simpatisan dan pendukung partai politik juga dapat mempengaruhi penentuan calon anggota legislatif melalui dukungan dan pemilihan mereka pada calon tertentu.

Terkait dengan pernyataan yang ada jika dibanding dengan partai demokrat dalam menetapkan bakal calon anggota legislatif sangatlah signifikan dengan realita yang terjadi sekarang. Partai demokrat dalam

menentukan calon legislatif memiliki beberapa persyaratan bagi para bakal caleg. Untuk pemilihan legislatif 2019 partai memilih kader partai yang berperan aktif. Kemudian setelah itu partai memberikan informasi bagi masyarakat umum terkait dengan pencalonan, artinya walaupun calon anggota legislatif itu belum menjadi kader partai demokrat dia dapat mencalonkan diri dengan persyaratan utama harus menjadi kader partai. Kemudian memiliki KTA (kartu tanda anggota), seorang kader partai harus memiliki simbol identitas sebagai kader partai demokrat. Calon anggota legislatif harus memiliki visi dan misi yang sama dengan partai demokrat.

SIMPULAN

Pola rekrutmen Partai Demokrat untuk menentukan calon anggota legislatif dilakukan dengan dua cara yaitu rekrutmen secara internal yakni partai mencalonkan kadernya untuk maju menjadi calon anggota legislatif pada pemilihan legislatif tahun 2019 di Kota Sorong berdasarkan aturan internal partai. Sedangkan secara eksternal, partai dapat merekrut masyarakat yang awalnya bukan kader partai demokrat tetapi memiliki potensi untuk meraih suara konstituen sehingga dapat direkrut sebagai kader partai demokrat. Kedua, kriteria penentuan calon anggota legislatif dari Partai Demokrat pada pemilihan legislatif

tahun 2019 di Kota Sorong ditentukan oleh Ketua partai, tetapi tidak terlepas juga bahwa musyawarah serta rapat terbuka bersama para anggota partai juga sebagai bagian dari pertimbangan Ketua partai.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik (edisi revisi). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Devitasari, I. 2017. Peran Anggota DPRD Perempuan dalam Pembuatan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Sulawesi Selatan. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 3(2), 108-124.
- Fitri Rahmadnia, 2015. Rekrutmen Calon Legislatif Pada Pemilu 2014 (Studi Kasus Mengenai Rekrutmen Politik PPP di Dapil 1 dan V Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- Ishaq, Jaelan Usman, Andi Luhur Priyanto. 2013. Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Polwan Provinsi Sulawesi Barat Pada Pemilu Tahun 2014. *Jurnal Otoritas: Ilmu Pemerintahan Unismuh* Vol. 3 No. 2, 27-39.
- Kristina A. Sianturi. 2015. Memperkuat Fungsi Rekrutmen Partai Politik.
- Prudjung, Chang. 2010. Rekrutmen Politik. <http://Rekrutmen-Politik.html>. diakses 12 Januari 2023
- Sihobing, Sadrakh Sigiopranata, 2021. *Sistem Rekrutmen Politik Partai Demokrat Pada Pemilihan Legislatif 2019 di Kota Medan. Study kasus:*

Partai Demokrat Kota Medan.
Fisip. Universitas Sumatra Utara

Syahputra Wengki. 2012. Pola Rekrutmen Partai Politik. Skripsi. Ilmu Politik. Universitas Andalas. Padang. diakses pada 21 November 2022

Teguh Adi Prasajo. Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif (Caleg) Dari Partai Golkar Untuk DPRD Jateng Periode 2014-2019. *Jurnal POLITIKA*, Vol.4, No.2, Oktober 2013. journal.undip.ac.id. diakses pada 20 November 2022.

PROFIL SINGKAT

Masni Banggu S.IP., M.Si merupakan dosen pengajar di program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Sorong sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang.